



**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

RENSTRA 2020-2024

EDISI REVISI (Penyesuaian 28 Juli 2022)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan reviu Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.

Reviu ini dilakukan terkait dengan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi yang baru sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada periode sebelumnya.

Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimana tugas BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Reviu Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024.

Medan, Juli 2022,
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara



Drs. Irwan Safii, M.Pd
NIP. 196512311992031014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1.Kondisi Umum.....	2
1.2.Potensi dan Permasalahan.....	18
BAB II Tujuan dan Sasaran	21
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	23
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	24
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kelembagaan	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	27
3.2 Kerangka Regulasi.....	28
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	28
3.4 Reformasi Birokrasi Kelembagaan.....	30
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pedoman	33
4.1 Target Kinerja	33
4.2 Kerangka Pendanaan.....	35
BAB V Penutup	37

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 : Jumlah sekolah per kab/kota di provinsi Sumatera Utara	2
Grafik 1.2 : Capaian SNP tiap jenjang di provinsi Sumatera Utara.....	4
Grafik 1.3 : Rerata capaian SNP per standar tiap jenjang di provinsi Sumatera Utara	5
Grafik 1.4 : Rerata capaian SNP per standar di Provinsi Sumatera Utara.....	7
Grafik 1.5 : Jumlah sekolah yang dipetakan mutu pendidikannya	8
Tabel 1.1 : Matrik Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	20
Tabel 2 : Program dan Sasaran Program (SP) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.1 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	26
Tabel 3.1 : Arah Kebijakan dan Strategi.....	27
Gambar 3.1: Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara	29
Tabel 3.2 : Jumlah ASN BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	30
Tabel 3.3 : 6 (Enam) Area Perubahan.....	31
Tabel 4.1 : Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024	33
Tabel 4.2 : Indikator kinerja pada 2 sasaran kegiatan dan 5 sub kegiatan	34
Tabel 4.3 : Kerangka pendanaan kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara	36
Tabel 4.4 : Kerangka kebutuhan pendanaan kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara	36

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dinyatakan bahwa untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu dilakukan pengintegrasian unit pelaksana teknis yang menangani fungsi penjaminan mutu pendidikan pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membentuk Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Berdasarkan Permendikbud di atas, BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Sedang fungsi BPMP meliputi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dengan perencanaan yang matang, maka BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis lembaga untuk dapat dilakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja lembaga.

1.1. Kondisi Umum

A. Gambaran Umum

Dalam priode Renstra Tahun 2015-2019 LPMP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan 8 SNP, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pencapaian 8 SNP serta peningkatan tata kelola di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

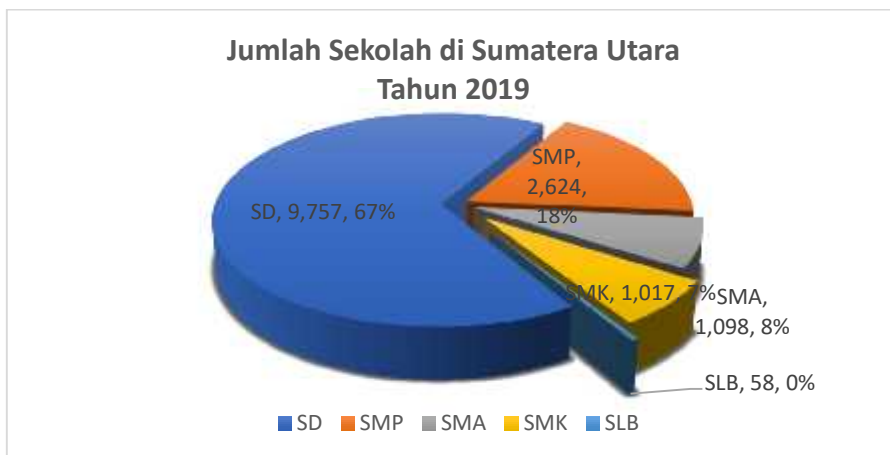
Ada 33 Kabupaten/Kota yang menjadi tugas LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Berikut data jumlah sekolah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Tabel 1.1. Jumlah sekolah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	SPK SD	SPK SMP	SPK SMA	Grand Total
1	Kab. Asahan	441	111	44	41	3				640
2	Kab. Batubara	246	57	23	22	1				349

Renstra 2020-2024 BPMP Prov. Sumut

3	Kab. Dairi	266	63	24	18	1				372
4	Kab. Deli Serdang	897	317	137	136	9	3	3	2	1,504
5	Kab. Humbang Hasudutan	218	47	15	14	1				295
6	Kab. Karo	293	66	24	13	2				398
7	Kab. Labuhan Batu	285	70	34	33	1				423
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	198	49	18	24					289
9	Kab. Labuhan Batu Utara	292	51	17	19	1				380
10	Kab. Langkat	636	165	69	74	1				945
11	Kab. Mandailing Natal	404	84	24	22	1				535
12	Kab. Nias	163	51	11	16					241
13	Kab. Nias Barat	104	39	16	13	1				173
14	Kab. Nias Selatan	354	135	65	48					602
15	Kab. Nias Utara	165	56	15	24					260
16	Kab. Padang Lawas	190	38	10	18					256
17	Kab. Padang Lawas utara	218	41	11	9	1				280
18	Kab. Pakpak Bharat	58	27	5	4	1				95
19	Kab. Samosir	203	34	14	7					258
20	Kab. Serdang Bedagai	471	92	41	40	1				645
21	Kab. Simalungun	828	153	51	44	2				1,078
22	Kab. Tapanuli Selatan	286	51	12	15	1				365
23	Kab. Tapanuli Tengah	319	79	24	21	1				444
24	Kab. Tapanuli Utara	386	80	26	24	1				517
25	Kab. Toba Samosir	224	51	17	22	2				316
26	Kota Binjai	165	52	29	24	3				273
27	Kota Gunungsitoli	105	34	12	14	2				167
28	Kota Medan	864	392	221	170	12	4	4	2	1,669
29	Kota Padang Sidempuan	96	26	19	17	2				160
30	Kota Pematangsiantar	162	43	30	37	2				274
31	Kota Sibolga	37	15	9	8	1				70
32	Kota Tanjung Balai	77	21	11	9	1				119
33	Kota Tebing Tinggi	99	27	16	17	3				162
Grand Total		9,750	2,617	1,094	1,017	58	7	7	4	14,554



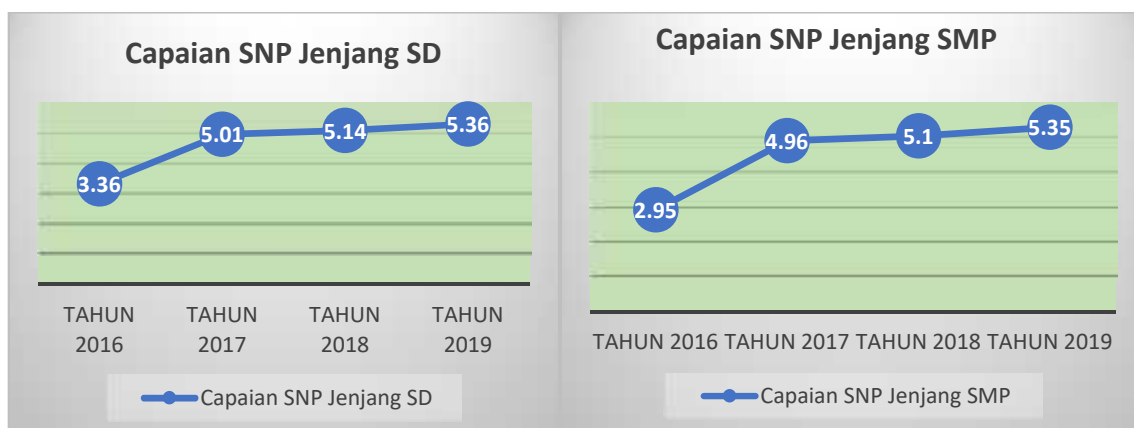
Capaian Renstra Periode 2015-2019 :

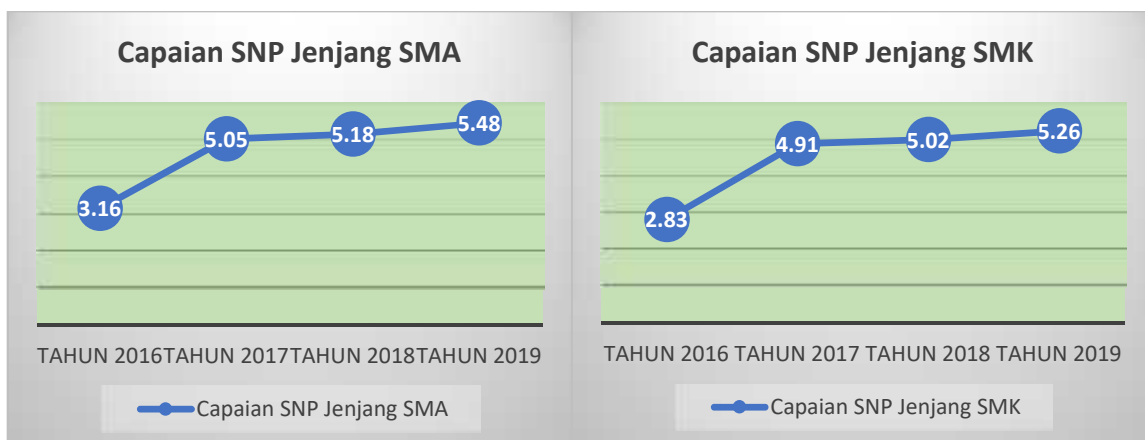
Berikut capaian kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2019.

1) Meningkatnya Capaian Mutu SNP.

Capaian mutu SNP pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Rata-rata capaian SNP satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 berada pada kategori “menuju SNP level 4”. Rata-rata indeks SNP jenjang SD berada pada angka 5,36; SMP 5,35; SMA 5,48 dan SMK 5,26. Capaian mutu SNP tersebut tidak terlepas dari berhasilnya pelaksanaan fasilitasi dan supervisi yang dilakukan.

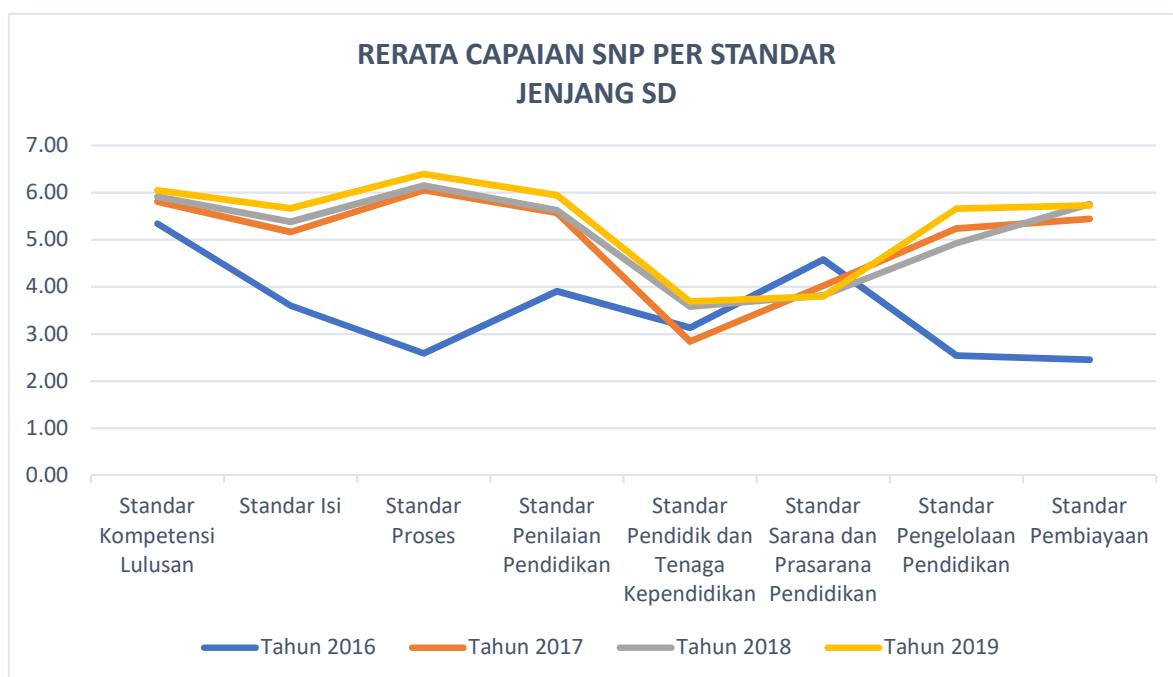
Grafik 1.2. Capaian SNP tiap jenjang di Provinsi Sumatera Utara.

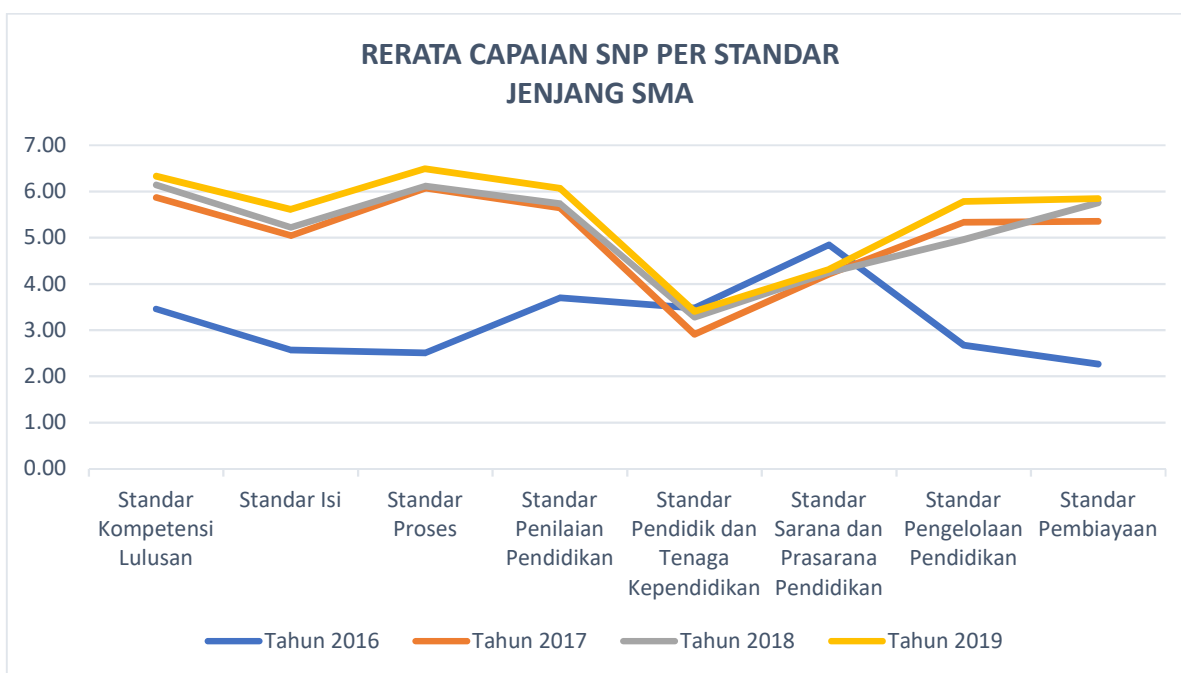
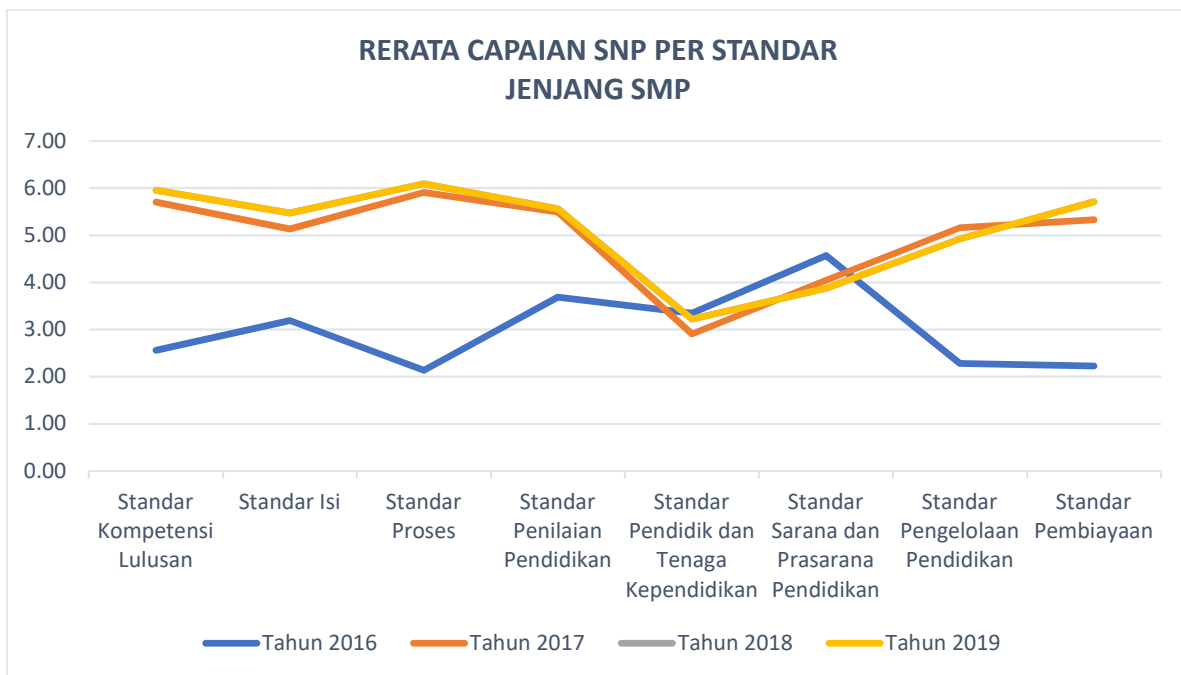


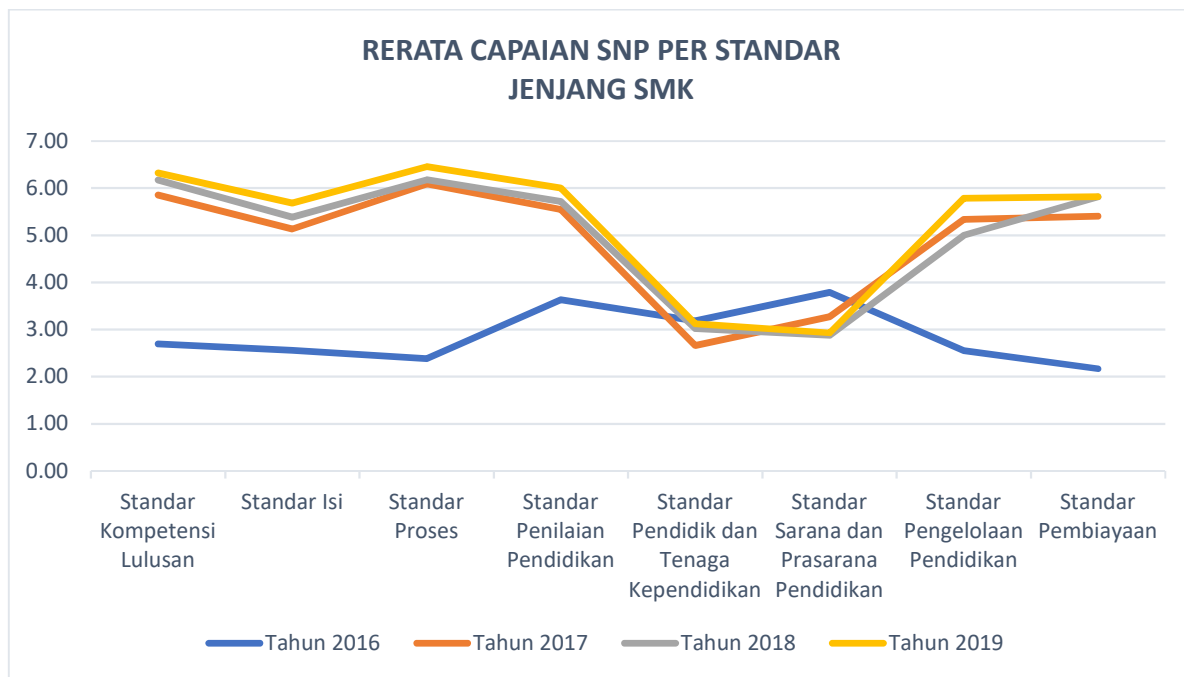


(Sumber: Laporan Kinerja LPMP Sumut 2019)

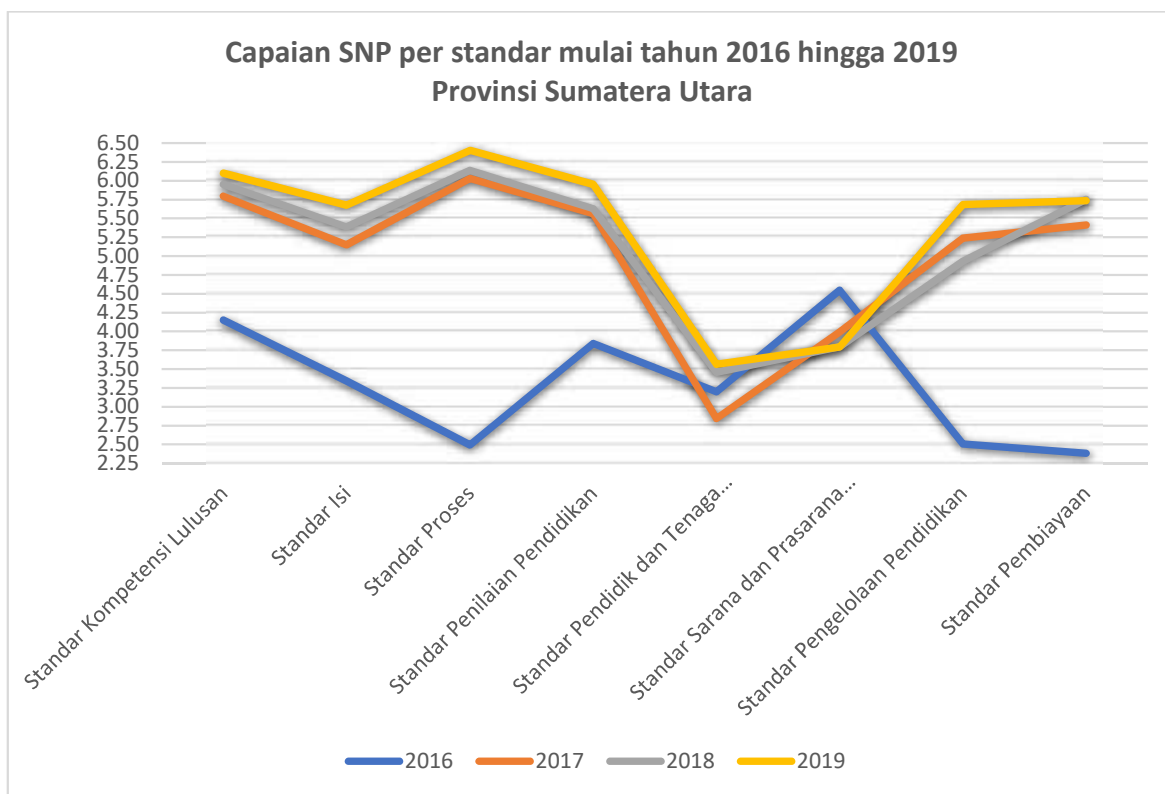
Grafik 1.3. Rerata Capaian SNP per standar tiap jenjang di Provinsi Sumatera Utara.







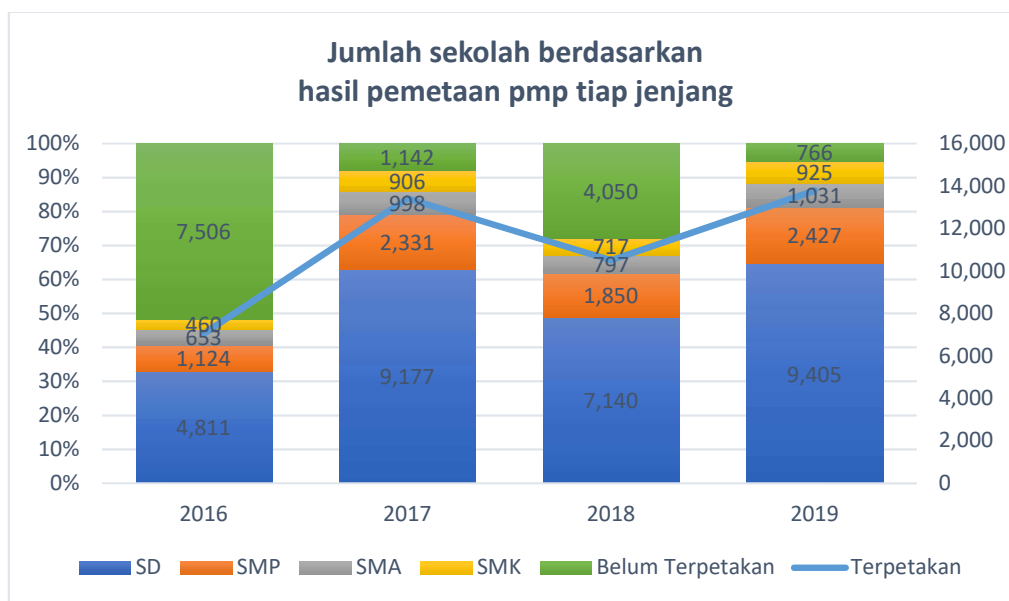
Grafik 1.4. Rerata Capaian SNP per standar di Provinsi Sumatera Utara.



2) Capaian Pemetaan Mutu Pendidikan

Berikut adalah jumlah sekolah di Provinsi Sumatera Utara yang dipetakan mutu pendidikannya.

Grafik 1.5. Jumlah sekolah yang dipetakan mutu pendidikannya.



B. Isu Strategis Penjaminan Mutu Pendidikan

Dimuatnya isu-isu strategis yang berkembang saat ini bertujuan agar arah perencanaan sesuai dengan kondisi terkini, sehingga renstra ini diharapkan dapat benar-benar mengakomodir kebutuhan peningkatan mutu pendidikan baik secara nasional maupun peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara khususnya.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang yaitu sebagai berikut.

1. Rapor Pendidikan

Rapor pendidikan merupakan bentuk penyempurnaan Rapor Mutu. Rapor Pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional. Rapor Pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2021 hasil Asesmen Nasional sebagai berikut:

Jenjang : SD/Sederajat
 Provinsi : SUMATERA UTARA
 Kabupaten/Kota : Semua Kabupaten/Kota

Jumlah Satuan Pendidikan : 9958
 Jumlah responden Siswa : 210429

Nomor Indikator	Nama Indikator	Capaian
A.1	Kemampuan literasi	Di bawah kompetensi minimum
A.2	Kemampuan numerasi	Di bawah kompetensi minimum
A.3	Indeks Karakter	Berkembang
B.1.2	Kesenjangan Literasi Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.2.2	Kesenjangan Numerasi Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.3.2	Kesenjangan Indeks Karakter Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.1.3	Kesenjangan Literasi Antar Wilayah	Ada perbedaan
B.2.3	Kesenjangan Numerasi Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
B.3.3	Kesenjangan Indeks Karakter Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
D.1	Kualitas pembelajaran	Terarah
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Pasif
D.3	Kepemimpinan instruksional	Terbatas
D.4	Iklm keamanan sekolah	Waspada
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	Merintis
D.8	Iklm Kebinekaan	Merintis
D.10	Iklm Inklusivitas	Merintis

Data bersumber dari respon Asesmen Nasional tanggal 19 januari 2022

©2022 Pusat Asesmen Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Kemendikbudristek

Jenjang : SMP/Sederajat
 Provinsi : SUMATERA UTARA
 Kabupaten/Kota : Semua Kabupaten/Kota

Jumlah Satuan Pendidikan : 3382
 Jumlah responden Siswa : 119085

Nomor Indikator	Nama Indikator	Capaian
A.1	Kemampuan literasi	Di bawah kompetensi minimum
A.2	Kemampuan numerasi	Di bawah kompetensi minimum
A.3	Indeks Karakter	Berkembang
B.1.2	Kesenjangan Literasi Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.2.2	Kesenjangan Numerasi Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.3.2	Kesenjangan Indeks Karakter Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.1.3	Kesenjangan Literasi Antar Wilayah	Ada perbedaan
B.2.3	Kesenjangan Numerasi Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
B.3.3	Kesenjangan Indeks Karakter Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
D.1	Kualitas pembelajaran	Disorientasi
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Pasif
D.3	Kepemimpinan instruksional	Terbatas
D.4	Iklm keamanan sekolah	Waspada
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	Merintis
D.8	Iklm Kebinekaan	Merintis
D.10	Iklm Inklusivitas	Merintis

Jenjang : SMA/SMK/Sederajat
 Provinsi : SUMATERA UTARA
 Kabupaten/Kota : Semua Kabupaten/Kota

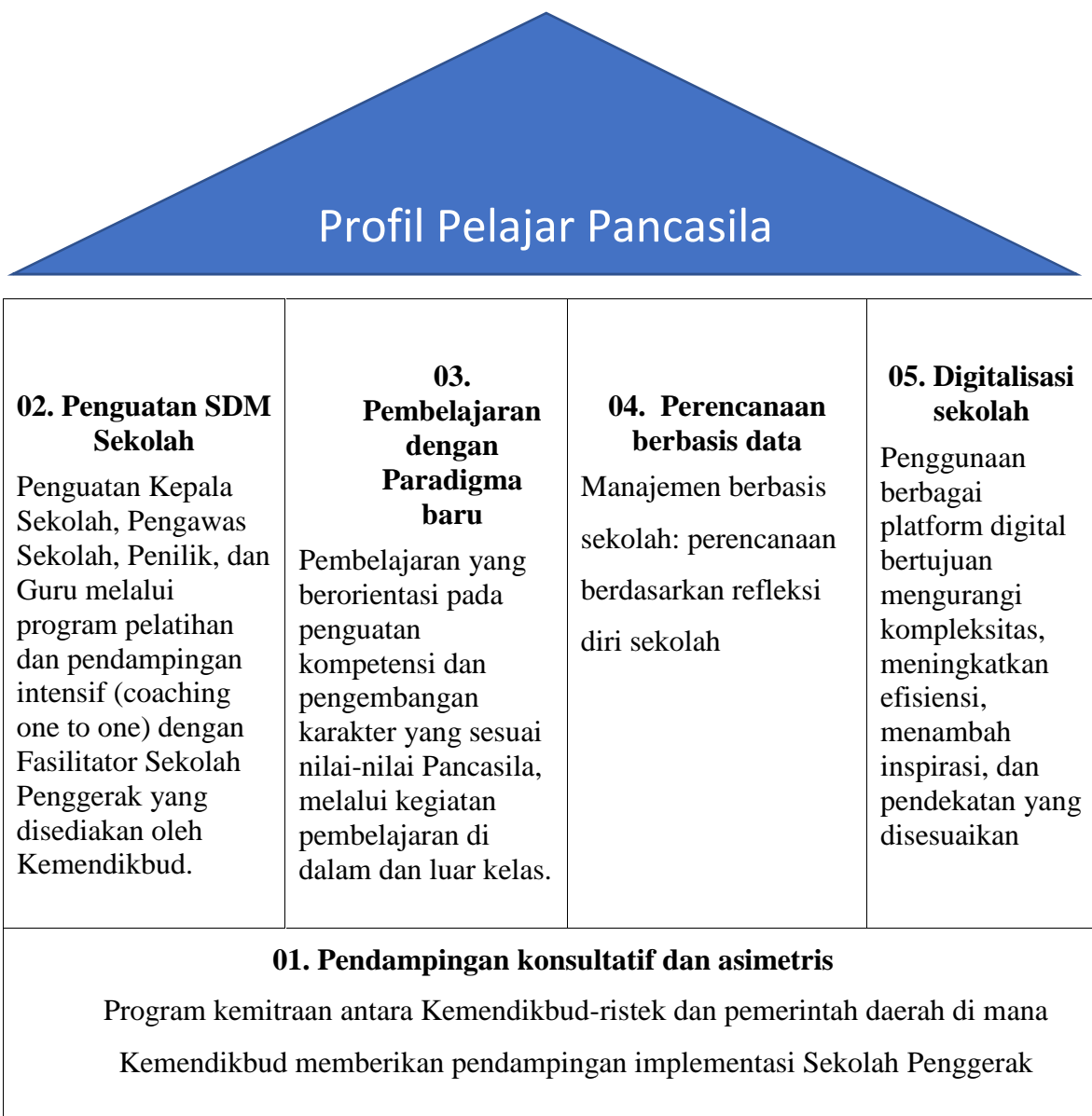
Jumlah Satuan Pendidikan : 2290
 Jumlah responden Siswa : 82551

Nomor Indikator	Nama Indikator	Capaian
A.1	Kemampuan literasi	Di bawah kompetensi minimum
A.2	Kemampuan numerasi	Di bawah kompetensi minimum
A.3	Indeks Karakter	Berkembang
B.1.2	Kesenjangan Literasi Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.2.2	Kesenjangan Numerasi Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.3.2	Kesenjangan Indeks Karakter Berdasarkan status sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan
B.1.3	Kesenjangan Literasi Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
B.2.3	Kesenjangan Numerasi Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
B.3.3	Kesenjangan Indeks Karakter Antar Wilayah	Tidak ada perbedaan
D.1	Kualitas pembelajaran	Terarah
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Pasif
D.3	Kepemimpinan instruksional	Terbatas
D.4	Iklm keamanan sekolah	Aman
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	Merintis
D.8	Iklm Kebinekaan	Merintis
D.10	Iklm Inklusivitas	Merintis

2. Sekolah Penggerak

Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan



Agar Program Sekolah Penggerak berkembang optimal dibutuhkan kolaborasi tinggi dari Pemda

No.	Program Sekolah Penggerak merupakan	Kolaborasi yang dibutuhkan dari Pemda
01	Program Kolaborasi antara Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama	Pemda berkomitmen tinggi sebagai pelaksana PSP
02	Intervensi dilakukan secara holistik , mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah	Pemda mengerti dan mendukung pelaksanaan seluruh intervensi PSP
03	Memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta	Pemda mendukung pelaksanaan PSP di seluruh kondisi sekolah
04	Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri	Pemda melanjutkan pendampingan transformasi sekolah setelah 3 tahun secara mandiri
05	Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak	Pemda & ekosistem sekolah dapat melanjutkan transformasi secara mandiri

Berikut ini adalah daftar kabupaten/kota pelaksana Program Sekolah Penggerak di provinsi Sumatera Utara:

a. Kabupaten/Kota Pelaksana PSP Angkatan I

- 1) Kota Medan
- 2) Kabupaten Deli Serdang
- 3) Kabupaten Karo
- 4) Kabupaten Serdang Bedagai
- 5) Kabupaten Batubara
- 6) Kabupaten Asahan

b. Kabupaten/Kota Pelaksana PSP Angkatan II

- 1) Kabupaten Dairi
- 2) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 3) Kabupaten Nias Barat
- 4) Kabupaten Nias Selatan
- 5) Kabupaten Padanglawas Utara
- 6) Kabupaten Tapanuli Utara
- 7) Kabupaten Tapanuli Selatan
- 8) Kota Binjai
- 9) Kota Padangsidimpuan
- 10) Kota Sibolga

c. Kabupaten/Kota Pelaksana PSP Angkatan III

- 1) Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2) Kabupaten Labuhanbatu
- 3) Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 4) Kabupaten Langkat
- 5) Kabupaten Mandailing Natal
- 6) Kabupaten Nias
- 7) Kabupaten Nias Utara
- 8) Kabupaten Pakpak Bharat
- 9) Kabupaten Padanglawas
- 10) Kabupaten Samosir
- 11) Kabupaten Simalungun
- 12) Kabupaten Tapanuli Tengah
- 13) Kabupaten Toba
- 14) Kota Gunungsitoli
- 15) Kota Pematangsiantar
- 16) Kota Tanjungbalai
- 17) Kota Tebing Tinggi

3. Implementasi Kurikulum Merdeka

Merdeka Belajar Episode 15 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar ditindak lanjuti dengan Implementasi kurikulum Merdeka sebagai bentuk fasilitasi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditujukan kepada Ibu bapak guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM dalam mempersiapkan keterlibatannya pada Kurikulum Merdeka pada tahun ini hingga kedepannya.

a. Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikburistek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.

Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan

pada masa sebelum pandemi menjadi satu satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d. 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 s.d. 2022 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK).

Pada masa sebelum dan pandemi, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 kemudian Kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali tahun 2021.

Pemulihan pembelajaran tahun 2022 s.d. 2024, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikburistek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran.

b. Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif, hal ini sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan

dalam mengimplementasikan kurikulum. Beberapa program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah adanya program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) dimana Kemendikburistek pada program tersebut memberikan dukungan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dari dua kegiatan tersebut didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan KM sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dari IKM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya.

Penyediaan dukungan IKM yang diberikan oleh Kemendikburistek adalah bagaimana kemendikbudristek memberikan dukungan pembelajaran IKM secara mandiri dan dukungan pendataan IKM jalur mandiri, dari dukungan tersebut akan mendapatkan calon satuan pendidikan yang terdata berminat dan akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas serta aktor lain dapat mengadakan kegiatan berbagi praktik baik Kurikulum Merdeka dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kemendikburistek memperoleh data kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, satuan pendidikan akan memperoleh dukungan yang baik dari kemendikbudristek dalam menjalankan IKM jalur mandiri. Praktik-praktik baik dan konten pembelajaran dari Kurikulum Merdeka jalur mandiri teridentifikasi dengan jelas sehingga menjadi fokus pada pendampingan oleh kemendikbudristek.

SP/SMK-PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat saling memberikan praktik baik dan pembelajaran, saling berbagi praktik baik sehingga terbentuk jejaring dukungan antar guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi konten pembelajaran dan praktik baik Kurikulum Merdeka secara luas, komunitas yang berkembang mendukung ekosistem yang siap menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional pada tahun 2024 yang secara masif.

c. Platform Merdeka Mengajar

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajar Pancasila yang memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya.

Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka, dalam fitur Mengajar, ada fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri, saat ini tersedia lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka. Fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik.

Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada. Fitur Belajar pada Platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Fitur lain dari Belajar adalah Video Inspirasi, fitur ini memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Fitur lainnya adalah Berkarya, dimana

fitur ini adalah memberikan “Bukti Karya Saya” yang merupakan best practice dari hasil implementasi pembelajaran terutama terkait best practice pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, guru dan tenaga kependidikan dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi sehingga guru dapat maju bersama.

Platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi teman bagi guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh kemendikbudristek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi yang Dimiliki

Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud tahun 2015-2019, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, adalah sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia yang memadai

BPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi Sumatera Utara. Proses penjaminan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan akan berhasil bila ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memadai. BPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 2 orang Pejabat Struktural, 10 orang Widyaprada, 71 orang Pelaksana dan 75 orang PPNPN. Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumber daya manusia BPMP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta jabatan dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Sarana dan Prasarana yang Menunjang

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung perkantoran, perpustakaan, ruang Teleconference, ruang aula, ruang kelas, mess, asrama, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu, internet dengan kapasitas yang memadai adalah salah satu pendukung teknologi informasi yang telah dimanfaatkan hingga semakin memperkuat BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Penggunaan sistem teknologi informasi juga digunakan dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan. Layanan informasi dan konsultasi yang dapat dilaksanakan antara lain NUPTK, Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penilaian Angka Kredit, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pemetaan Mutu Pendidikan, Publikasi ilmiah, Teknologi Pembelajaran, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.

3. Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan

Keberadaan BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan mendapatkan apresiasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait. Kepercayaan para pemangku kepentingan ini ditunjukkan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kabupaten/kota dalam optimalisasi berbagai program dan kegiatan bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara disusun dan diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pemenuhan standar nasional pendidikan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pendidikan di Provinsi Sumatera Utara di antaranya:

1. Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam implementasi keterlaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang belum optimal;
2. Pemahaman pemangku kepentingan tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal;
3. Pemanfaatan rapor pendidikan belum digunakan secara maksimal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemenuhan mutu dan monitoring dan evaluasi peningkatan mutu;
4. Keterlambatan rilis platform rapor pendidikan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;

C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Adanya potensi dan permasalahan yang dihadapi BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara menjadi dasar analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Tabel 1.1: Matrik Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

No.	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Permendikbud No. 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP.	Belum dibuka kesempatan untuk mengisi sesuai peta jabatan	Mengusulkan peta jabatan untuk jenjang karir bagi jabatan fungsional tertentu	Tertundanya jenjang karir pegawai
2	Tersedianya dana operasional dan fasilitas sumber daya Lembaga	-	-	-
3	Sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun	Tidak semua SDM memiliki kualitas yang memadai	Perlu peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang kinerja	Tidak memperoleh hasil kerja yang maksimal
4	Tersedianya sistem informasi yang memadai dalam mendukung terlaksananya semua program yang telah direncanakan	Sistem informasi belum terkelola secara dinamis dan kontinyu	Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung program-program Lembaga	Informasi yang disajikan tidak menarik karena tidak dilakukan secara dinamis dan kontinyu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di daerah, BPMP Provinsi Sumatera Utara mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan. BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mengemban amanat tersebut mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 adalah:

“ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Adapun visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2024, yakni “

Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi
Presiden untuk Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak
mulia, gotong royong dan berkebinekaan global.

BPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Guna menyelaraskan visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan visi BPMP Provinsi Sumatera Utara, maka BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi sebagai berikut :

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global.

BPMP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan misi yang juga merupakan penyelenggaraan fungsi sesuai permendikbudristek nomor 11 tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. Melaksanakan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi

2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran - terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbudristek menetapkan lima tujuan sebagai berikut.

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perumusan tujuan dari Kemdikbudristek diatas menjadi dasar perumusan tujuan dari unit eselon 1 Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
(hal 17 Renstra Ditjen PAUD, Dasmen)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara dan selaras dengan sasaran program dari Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen, BPMP Provinsi Sumatera Utara merumuskan tujuan sebagai berikut.

- 1 Meningkatkan Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara.

- 2 Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang berkualitas.

Untuk mengukur tercapainya tujuan, BPMP Provinsi Sumatera Utara merumuskan indikator kinerja tujuan yang memuat target tujuan pada akhir periode Renstra. Indikator kinerja tujuan yang dirumuskan BPMP Provinsi Sumatera Utara berasal dari indikator kinerja program yang disesuaikan dengan tupoksi Balai.

Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya sebesar 3,92%
2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) sebesar 35%
3. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Predikat A
4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu 85%

2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, diperlukan sejumlah Sasaran Program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2024 oleh Kemendikbudristek yaitu:

Tabel 2: Program dan Sasaran Program (SP) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020-2024

No	Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program (SP)
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

		seluruh jenjang		
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pencapaian perkembangan anak 2. Meningkatkan nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran 4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 2. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemdikbudristek

Berdasarkan Tupoksinya, BPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang merupakan turunan dari sasaran program dan indikator kinerja program dari Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen. Berikut kami sampaikan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan.

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen*			BPMP Provinsi Sumatera Utara		
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran		Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<p>IKK 2.2.7.11 Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya</p> <p>IKK 2.2.7.12 Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)</p>
2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	IKP 5.3.6 Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen		Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<p>Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</p>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KEBALAIAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana teknis di Provinsi Sumatera Utara, juga menuangkan perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Utara yang menjadi dasar, pedoman, acuan dalam perencanaan penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu	Peningkatan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

3.2 KERANGKA REGULASI

BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut.

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

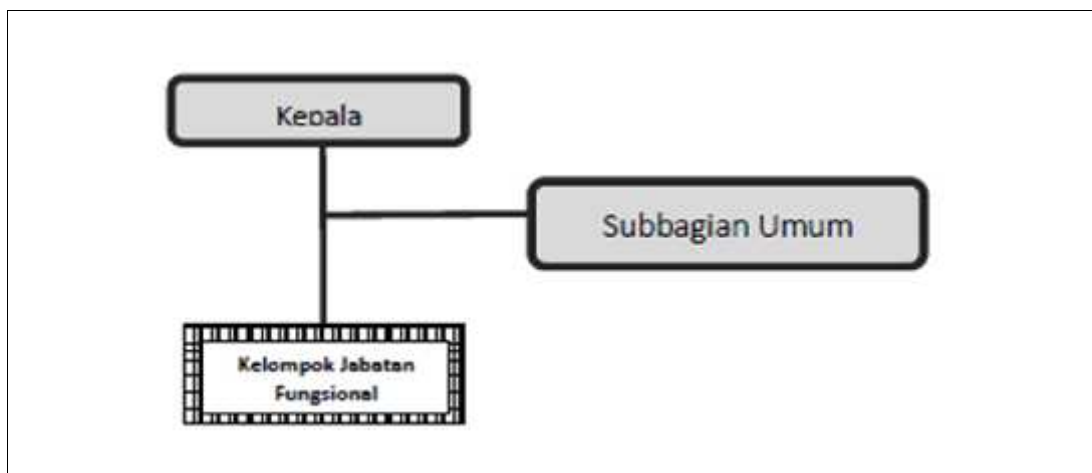
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

BPMP Provinsi Sumatera Utara harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

1. Struktur Organisasi

BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara



2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara. Berbagai upaya yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan ASN diprioritaskan bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan yang ada agar dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh pengguna dan penerima layanan BPMP Provinsi Sumatera Utara.

Fokus pengembangan kompetensi ASN BPMP Provinsi Sumatera Utara pada periode Renstra 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan ASN yang memiliki

kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality, networking, dan entrepreneurship* sesuai dengan roadmap SDM secara nasional.

Tabel 3.2. Jumlah ASN BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Kepala Subbagian Umum	1
3	Pelaksana	71
4	Kelompok Fungsional	10
Total		83

(sumber data: Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara Juli 2022)

3.4 REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program

Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting.

BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi enam area perubahan, yaitu:

Tabel 3.3. 6 (Enam) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none">) Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)) Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara) Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja) Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none">) Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara) Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP) Penguatan Sistem Manajemen Konflik
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none">) Perencanaan terintegrasi dan lintas sector (<i>collaborative</i>)) Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none">) Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan) Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 	<ul style="list-style-type: none">) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi) Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi) Assessment Pegawai) Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik) Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai) Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none">) Penyusunan dokumen standar pelayanan) Penyusunan alur layanan public) Mengembangkan budaya pelayanan prima) Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik) Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEDOMAN

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan Balai dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMP Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 2 (dua) IKK inti dan 2 (dua) IKK pendukung yang akan dicapai, yaitu:

1. Layanan penjaminan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.

a. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024.

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			Satuan	Base line 2020	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD,	1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,98	3,92

	Dikdas, dan Dikmen						
		1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25	30	35
2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1 Predikat SAKIP BPMP Sumatera Utara	Predikat	BB	A	A	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	82	83	84	85

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran kegiatan tersebut, telah ditetapkan: 2 (dua) sasaran kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan di BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Adapun Indikator Kinerja pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di BPMP Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen		
	1. Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD yang meningkat mutu pembelajarannya
		Persentase satuan pendidikan jenjang DIKMAS yang meningkat mutu pembelajarannya
	2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya jenjang SD
		Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya jenjang SMP
		Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya jenjang SMA
3. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Sumatera Utara		
	3. Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara
	4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL

b. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Label	Kode	Program/Output/Kegiatan	Realokasi 2022
Kegiatan	6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp. 13.769.418.000,-
Kegiatan	2005.EBA	Layanan dukungan manajemen internal	Rp.23.553.916.000,-
Kegiatan	2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 50.000.000,-

Tabel 4.4 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara 2021-2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Program Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah	29.510.478.000	37.373.334.000	50.069.654.000	50.069.654.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus pemerintah pada RPJMN IV. Oleh karena itu Renstra ini disusun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek dalam melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Renstra ini menjabarkan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara beserta sasaran program, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran program yang ditargetkan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024. Selain itu Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi BPMP Provinsi Sumatera Utara, ataupun pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh ASN di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara.